

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN NILAI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/786/M.SM.02.00/2023 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 1/E);
15. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 107/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 11/D);

16. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 93/D);
17. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 110/D);
18. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 113/D);
19. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 116/D);
20. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 103/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 18/D);
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 6/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Bagi

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 40/D);

22. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 28/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Huruf B Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 6/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 40/D), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 7 November 2023

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 32/D

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu

Nomor : 32 Tahun 2023

Tanggal : 7 November 2023

**NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU**

B. NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

NO	NOMENKLATUR JABATAN	BOBOT JABATAN	
		KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4
I	SEKRETARIAT DAERAH		
	Bagian Hukum		
1.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	1610
2.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	1280
	Bagian Organisasi		
3.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
4.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1280
5.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1735
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
6.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
7.	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	8	1270
8.	JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	1695
9.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
10.	JF Pranata Komputer Penyelia	8	1230
11.	JF Pranata Komputer Mahir	7	1005
12.	JF Pranata Komputer Pelaksana	6	740
	Bagian Umum		
13.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
14.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
15.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
16.	JF Arsiparis Terampil	6	740

17.	JF Penata Laksana Barang Pelaksana	7	1070
II.	SEKRETARIAT DPRD		
18.	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	1280
19.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1280
20.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
21.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
22.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
23.	JF Arsiparis Terampil	6	740
III.	INSPEKTORAT		
24.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama	8	1280
25.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda	10	1655
26.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya	12	2145
27.	JF Auditor Ahli Muda	10	1655
28.	JF Auditor Penyelia	9	1380
29.	JF Auditor Ahli Pertama	8	1280
30.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
31.	JF Auditor Mahir	7	940
32.	JF Arsiparis Muda	9	1355
33.	JF Auditor Terampil	6	690
34.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
35.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
36.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
37.	JF Arsiparis Terampil	6	740
38.	JF Auditor Ahli Madya	12	2250

IV.	DINAS PENDIDIKAN		
39.	JF Pengawas Sekolah Ahli Madya	11	1960
40.	JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	9	1385
41.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
42.	JF Analis Kepegawaian Ahli Muda	9	1355
43.	JF Penilik Ahli Madya	11	1930
44.	JF Pengawas Sekolah Ahli Utama	13	2585
45.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
46.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
47.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1280
48.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1735
49.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
50.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1355
51.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
52.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
53.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
54.	JF Arsiparis Terampil	6	740

V.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
55.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
56.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
57.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
58.	JF Arsiparis Terampil	6	740
59.	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	1280
60.	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana	6	805
VI.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
61.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
VII.	DINAS PARIWISATA		
62.	JF Pamong Budaya Ahli Muda	9	1355
63.	JF Pamong Budaya Ahli Pertama	8	1280
64.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
65.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
66.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
67.	JF Arsiparis Terampil	6	740
VIII.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
68.	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1280
69.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
70.	JF Pranata Komputer Penyelia	8	1230
71.	JF Pranata Komputer Mahir	7	1005
72.	JF Pranata Komputer Pelaksana	6	740
73.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
74.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
75.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
76.	JF Arsiparis Terampil	6	740
IX.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
77.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
78.	JF Pustakawan Ahli Muda	9	1355
79.	JF Pustakawan Terampil	6	740
80.	JF Pustakawan Ahli Madya	11	1930
81.	JF Pustakawan Ahli Pertama	8	1280

82.	JF Pustakawan Penyelia	8	1230
83.	JF Pustakawan Mahir	7	1005
84.	JF Pustakawan Pelaksana	6	740
85.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
86.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
87.	JF Arsiparis Terampil	6	740
88.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
89.	JF Pranata Komputer Penyelia	8	1230
90.	JF Pranata Komputer Mahir	7	1005
91.	JF Pranata Komputer Pelaksana	6	740
X.	DINAS KESEHATAN		
92.	JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	1280
93.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
94.	JF Apoteker Ahli Pertama	8	1295
95.	JF Asisten Apoteker Mahir	7	1020
96.	JF Asisten Apoteker Terampil	6	755
97.	JF Bidan Ahli Muda	9	1355
98.	JF Bidan Mahir	7	1005
99.	JF Bidan Terampil	6	740
100.	JF Bidan Penyelia	8	1230
101.	JF Bidan Ahli Pertama	8	1280
102.	JF Dokter Gigi Ahli Madya	12	2225
103.	JF Dokter Gigi Ahli Muda	10	1670
104.	JF Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1370
105.	JF Dokter Ahli Madya	12	2225
106.	JF Dokter Ahli Muda	10	1720
107.	JF Dokter Ahli Pertama	9	1570
108.	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	1280
109.	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1555

110.	JF Nutrisionis Ahli Muda	9	1555
111.	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1005
112.	JF Nutrisionis Penyelia	8	1230
113.	JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	1280
114.	JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	1355
115.	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	1280
116.	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1035
117.	JF Perawat Gigi Pelaksana/Terampil	6	770
118.	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1260
119.	JF Perawat Ahli Madya	11	1960
120.	JF Perawat Ahli Muda	9	1385
121.	JF Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1035
122.	JF Perawat Pelaksana/Terampil	6	770
123.	JF Perawat Penyelia	8	1260
124.	JF Perawat Ahli Pertama	8	1310
125.	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1035
126.	JF Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1005
127.	JF Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana/Terampil	6	740
128.	JF Pranata Lab. Kesehatan Penyelia	8	1230
129.	JF Sanitarian Ahli Muda	9	1370
130.	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1020
131.	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1035
132.	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana/Terampil	6	770
133.	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1355
134.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1280
135.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1735
136.	JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	9	1355
137.	JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	1280

138.	JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1555
XI.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
139.	JF Teknisi Pengairan Ahli Pertama	8	1325
140.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
141.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
142.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
143.	JF Arsiparis Terampil	6	740
XII.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
144.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
145.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
146.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
147.	JF Arsiparis Terampil	6	740
XIII.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
148.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	1280
149.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10	1735
150.	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	1280
151.	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	10	1735
152.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
153.	JF Pranata Komputer Pelaksana	6	740
154.	JF Perencana Ahli Muda	9	1355
155.	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	1270
156.	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	1520
157.	JF Pranata Komputer Penyelia	8	1230
158.	JF Pranata Komputer Mahir	7	1005
159.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
160.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
161.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
162.	JF Arsiparis Terampil	6	740

163.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	6	840
164.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	7	1005
165.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8	1230
XIV.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
166.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
167.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
168.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
169.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
170.	JF Arsiparis Terampil	6	740
171.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
172.	JF Pranata Komputer Penyelia	8	1230
173.	JF Pranata Komputer Mahir	7	1005
174.	JF Pranata Komputer Pelaksana	6	740
XV.	DINAS PERHUBUNGAN		
175.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	6	770
176.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	7	1035
177.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1260
178.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
179.	JF Arsiparis Terampil	6	740
180.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
XVI.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DA PERDAGANGAN		
181.	JF Penera Terampil	6	740
182.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
183.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
184.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
185.	JF Arsiparis Terampil	6	740
186.	JF Penera Ahli Muda	9	1555
187.	JF Penera Mahir	7	1005
XVII.	DINAS SOSIAL		

188.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
189.	JF Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	1280
190.	JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	1385
191.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
192.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
193.	JF Arsiparis Terampil	6	740
XVIII.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
194.	JF Analis Kebakaran Ahli Madya	11	1990
195.	JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	1385
196.	JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	8	1295
197.	JF Pemadam Kebakaran Terampil	6	695
198.	JF Pemadam Kebakaran Mahir	7	1000
199.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
200.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
201.	JF Arsiparis Terampil	6	740
202.	JF Pranata Komputer Mahir	7	1005
203.	JF Pemadam Kebakaran Penyelia	8	1275
XIX.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
204.	JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	1445
205.	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	8	1270
206.	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	8	1320
207.	JF Polisi Pamong Praja Mahir	7	1095
208.	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	745
XX.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
209.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
210.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1280
211.	JF Perencana Ahli Muda	10	1610
212.	JF Perencana Ahli Pertama	8	1280

213.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
214.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
215.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
216.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
217.	JF Arsiparis Terampil	6	740
XXI.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
218.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
219.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8	1280
220.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1280
221.	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1735
222.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
223.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
224.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
225.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
226.	JF Arsiparis Terampil	6	740
XXII.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
227.	JF Arsiparis Ahli Muda	9	1355
228.	JF Pranata Komputer Terampil	6	740
229.	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama	8	1295
230.	JF Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	9	1490
231.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
232.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
233.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
234.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	1355
235.	JF Arsiparis Terampil	6	740
XXIII.	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
236.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
237.	JF Arsiparis Mahir	7	1005

238.	JF Arsiparis Terampil	6	740
XXIV.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
239.	JF Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	8	1220
240.	JF Analisis Kebencanaan Ahli Muda	9	1435
241.	JF Penata Penggulangan Bencana Ahli Pertama	8	1310
242.	JF Penata Penggulangan Bencana Ahli Muda	9	1450
243.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
XXV.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
244.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
245.	JF Arsiparis Penyelia	8	1230
246.	JF Arsiparis Mahir	7	1005
247.	JF Arsiparis Terampil	6	740
XXVI.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
248.	JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	1355
249.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	1280
250.	JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	1310
251.	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1260
252.	JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	1385
253.	JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya	11	2030
XXVII	DINAS TENAGA KERJA		
254.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	1310
255.	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10	1720

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI